BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
KOTA BENGKULU
SABTU, 25 AGUSTUS 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Lintas Audit DD Tahap II

PELABAI - Realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun 2018 belum diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Lebong. Alhasil, belum diketahui apakah DD dan ADD tahap II yang dilaksanakan 93 desa sudah terserap maksimal atau belum. Rencananya Inpektorat baru akan melakukan audit DD dan ADD tahap II awal September.

''Kalaupun tidak terkejar, paling lambat pertengahan September audit sudah berjalan. Kami harap OPD teknis menyiapkan SPj (surat pertanggungjawaban, red) dokumen DD dan ADD dari masing-masing desa penerima DD dan ADD tahun ini," kata Sekretaris Inpektorat Kabupaten Lebong, Andi Febriansyah, SE kepada RB.

Diharapnya seluruh pemerintah desa penerima DD dan ADD menyiapkan SPj serta dokumen penunjang lainnya. Khususnya progres kegiatan fisik yang sudah digulirkan. Saat ini Inspektorat masih menyusun Program Kerja Audit (PKA) khusus DD dan ADD tahun 2018. Dipastikannya PKA sudah selesai Agustus ini.

''Perlu dipahami tim audit di Inspektorat Kabupaten Lebong masih sangat terbatas orangnya. Sejauh ini kami baru memiliki lima orang yang telah memiliki sertifikat dari tujuh orang auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten Lebong," terang Andi.

Dijelaskannya, pelaksanaan audit DD dan ADD oleh Inspektorat masih difokuskan pada pengelolaan keuangan. Sementara untuk audit fisiknya, belum bisa dilaksanakan oleh Inspektorat karena terkendala sarana pendukung. Namun ke depan pihaknya terus mengupayakan agar Inspektorat memiliki sarana penunjang sehingga bisa melakukan audit fisik.

''Jika dalam audit keuangan DD dan ADD ditemukan masalah, tim auditor dari Inspektorat akan segera memanggil pemerintah desa terkait untuk melakukan perbaikan. Tahapan itu mutlak dilakukan sebagai bentuk pembinaan. Tetapi jika permasalahan keuangan tidak bisa lagi diperbaiki, kami akan melimpahkan permasalahan DD dan ADD itu ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti," tutup Andi.

Sementara Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong, Eko Budi Santoso, SP, M.Eng mengaku belum ada satupun desa yang menyerahkan SPj DD dan ADD tahap II. Alhasil desa-desa penerima DD dan ADD belum bisa mengajukan proses pencairan DD dan ADD tahap III.

''Dana yang sudah digulirkan ke 93 desa berkisar Rp 40an miliar atau 60 persen dari total DD dan ADD tahun ini senilai Rp 68 miliar lebih. Kami harap masing-masing pemdes penerima DD dan ADD tahun ini segera melaporkan progres DD dan ADD tahap II tahun ini," tukas Eko.(**sca**)